

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ridwan Hr, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada,
Jakarta

Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*.
Jakarta. Sinar Grafika.

Mohtar Mas'oed, 2016, *Perbandingan Sistem Politik*, Cetakan Ke-16,
Universitas Gadjah Mada Press, Yogyakarta

Philipus M Hadjon, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia*,
Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Agussalim Andi Gadjong, 2017. *Pemerintahan Daerah: Kajian Politik Dan
Hukum*, Bogor Ghalia Indonesia

Ranupandojo, B Siswanto, 2003 , *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia
Pendekatan Administrasi dan Operasional*, Jakarta: Bumi Aksara

Aminuddin Ilmar, 2016, *Hukum Tata Pemerintahan*, Fajar Interpretama
Mandiri, Jakarta

Ganjong, 2007, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Galhia
Indonesia, Bogor

Muhammad Fauzan, 2010, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Edisi revisi,
STAIN Press, Purwokerto



Atmosudirdjo, 1995, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia
Indonesia, Jakarta

Aminuddin Ilmar, 2016, *Hukum Tata Pemerintahan*, Fajar Interpratama
Mandiri, Jakarta

Sadjijono. (2011), *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*. LaksBang,
Yogyakarta

Bagir Manan, 2000. *Bentuk-bentuk perbuatan hukum keperdataan yang
dapat dilakukan oleh pemerintahan daerah*, Bandung, Makalah
Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran

Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan
Artikel*. Cetakan ke 3, Yogyakarta. Mirra Buana Media

Jurnal

Wibawa, K. C. S. (2019). *Urgensi Keterbukaan Informasi dalam
Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik*. *Administrative Law and Governance
Journal*, 2(2),

Muhammad Khorul Anwar, 2017. *Transformatif Model Inovatif Untuk
Pelayanan Teroadu satu Pintu di Indonesia*. Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik UMJ

Rina Handayani, Aditia Syaprillah, 2023, *Penegakan Hukum Administrasi
Lingkungan Terhadap Pencemaran Sungai di Kabupaten Malinau*.
Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan



Kurniawan, R. C. 2016. *Tantangan kualitas pelayanan publik pada pemerintah daerah*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan, 7(1),

Suhartoyo, 2019. *Implementasi Fungsi pelayanan public dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol.2 , Issue 1,

Yusrisdi, Misdawati. 2017. *Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman. Vol.7

Syafrudin, 2000. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*. Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung

Philipus M.Hadjon, 1997. *Tentang Wewenang* Jurnal Pro Justisia, Yuridika, No .5 dan 6

Baihaqi, B. (2017). *Pengawasan sebagai fungsi manajemen perpustakaan dan hubungannya dengan disiplin pustakawan*. LIBRIA, No.8

Kezia M. *Pengawasan Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Pusat Menurut UU Nomor 9 Tahun 2015*. Lex Administratum. Vol. VIII/No. 3. Tahun 2020.

Skripsi

Junaidi, 2021, *Efektivitas Penerapan Online Single Submission (Oss) Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Di Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan*



Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Ria

Rochmat Adi Saputro, 2021, *Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora dalam Memberikan Pelayanan Perizinan*, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik

Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan elayanan Publik



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Lembaga administrasi Republik Indonesia, pedoman pealoparan akuntabilitas klinerja instansi pemerintah, Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Jakarta, 2000

Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 138 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Gubernur nomor 26 Tahun 2019 Tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu pada pemerintah daerah provinsi sulawesi selatan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusha di daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan

erizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman lodal



Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/kota

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non Perizinan

Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Bantaeng

Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 55 tahun 2014 tentang Mekanisme Pelayanan Perizinan, non Perizinan, dan Penanganan Pengaduan di Kantor PTSP Kabupaten Bantaeng

Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di daerah



Lampiran



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Kartini Nomor 2 Bantaeng, Kode Pos 92411
Email: kptsbantaeng@gmail.com Website: www.dprmpsp.bantaengkab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.7.22.1/ 26 /DPM-PTSP

Yang bertanda tangan di bawah ini an. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng, menerangkan bahwa :

Nama : RIJAL EFENDI
Tempat, Tanggal Lahir : Bantaeng, 12 April 2000
NIM : B021201018
Fakultas : Hukum
Universitas Hasanuddin
Jurusan : Hukum Administrasi Negara

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian (Research) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng, terhitung tanggal 02 – 15 Januari 2024 guna penulisan skripsi dengan judul : "KEWENANGAN PENGAWASAN IZIN YANG DIKELUARKAN DALAM SISTEM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantaeng, 05 Maret 2024

As- KERALA DINAS
Kepala Dinas,

MUHAMMAD HARIS, S.Pd.M.Si
NIP. 197103091992031008

